



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra merupakan dokumen penting dalam perencanaan yang merupakan dasar pembuatan Rencana Kerja setiap tahunnya sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, serta meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa sehingga dapat mendorong kemajuan dan keberdayaan desa.

Penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Renstra ini.

Kuala Tungkal, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19840624 201101 1 005

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	32
BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	37
BAB V Penutup.....	63

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pangkat dan pendidikan pegawai Dinas PMD.....	13
Tabel II. 2 Aset/modal Dinas PMD	13
Diagram Perkembangan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	14
Tabel Status Desa Tahun 2024 berdasarkan Data Indeks Membangun Per Kecamatan	15
Tabel Indeks Desa Tahun 2025.....	16
Diagram Data 2025 (sementara) berdasarkan Aplikasi Pemeringkatan BUMdesa dan BUMdesa Bersama Kemendesa.....	21
Tabel Klasifikasi BUMdesa Bersama Data Semester I Tahun 2024 Aplikasi Kemendesa	21
Tabel Klasifikasi BUM desa Semester I Tahun 2024 Aplikasi Kemendesa.....	22
Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah....	26
Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	33
Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	34
Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah	35
Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	36
Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	46
Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	59
Tabel Indikator Kinerja Utama	61
Tabel Indikator Kinerja Kunci	61
Tabel Indikator Kinerja sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.....	61

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan strategis suatu organisasi atau Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program untuk jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

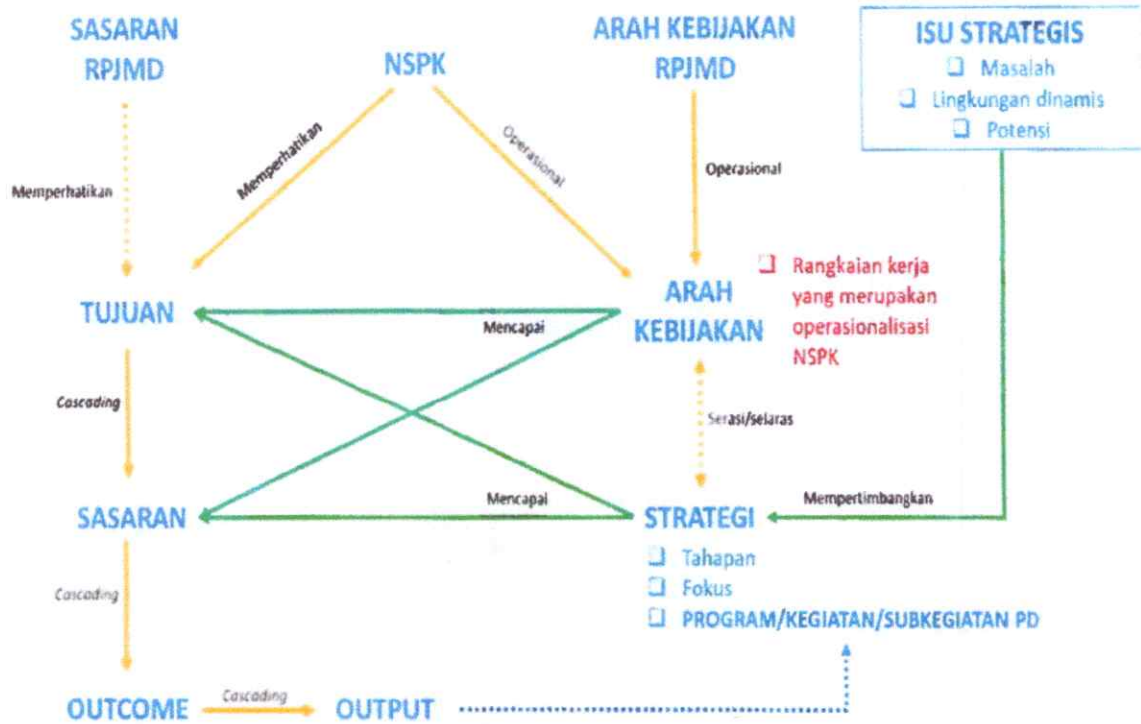
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat asta cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Renstra kemudian dijadikan acuan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dan juga dijadikan acuan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappeda dan juga perlu memperhatikan Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian, yang dalam hal ini Renstra Kemendesa dan Dinas P3AP2 Provinsi Jambi.

Renstra disusun dengan memperhatikan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomo 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753)
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240115-1350 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5)
27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

I.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat Program dan Kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja selama 5 (lima) Tahun sehingga dapat terukur pelaksanaannya.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah)

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada)
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA NYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 1. Uraian program;
- 2. Uraian Kegiatan;
- 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan fungsi;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa, fasilitasi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan;

- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten, fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bina administrasi pemerintahan desa;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, tata wilayah desa, penataan kewenangan desa, penamaan dan kode desa, penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat, dan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan produk hukum desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan laporan kepala desa dan pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, manajemen pemerintahan desa dan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

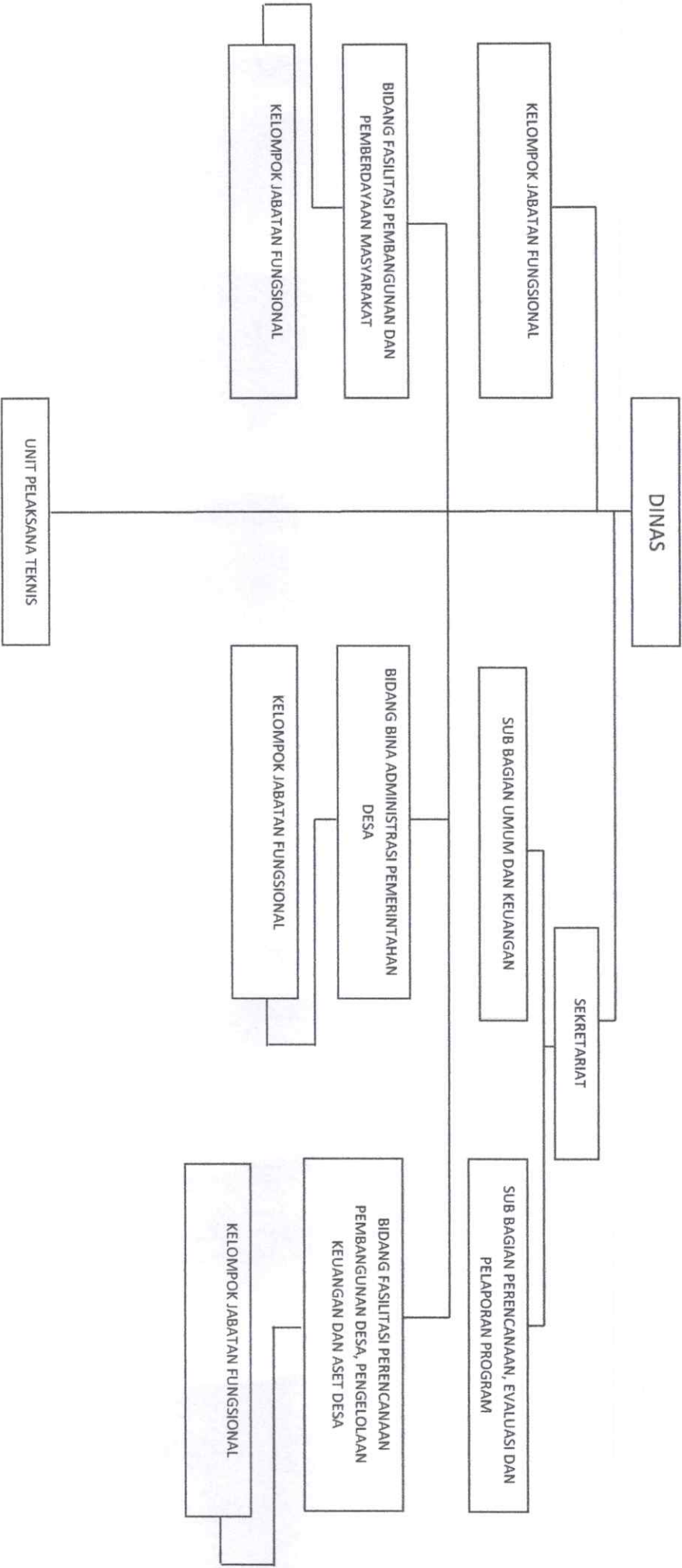
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi pengelolaan aset desa dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG BARAT



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

II.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 29 orang ASN (25 orang PNS dan 4 orang PPPK) dan 19 Honorer.

Tabel II.1 Pangkat dan Pendidikan pegawai Dinas PMD

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan			
				S2	S1	D3	SLTA
1.	Pembina Tingkat I	IV /b	2		2		
3	Pembina	IV /a	4	2	2		
4	Penata Tingkat I	III/d	7		7		
5	Penata	III/c	2		2		
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1		1		
7	Penata Muda	III/a	6		2		4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	2				2
9	Pengatur	II/c	1				1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-				
11	Pengatur Muda	II/a	-				
12	PPPK	IX	2		2		
13	PPPK	V	2				2
14	Honorer	-	19		6		13

b. Aset/Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan aset/modal sebagai berikut;

Tabel II.2 Aset/modal Dinas PMD

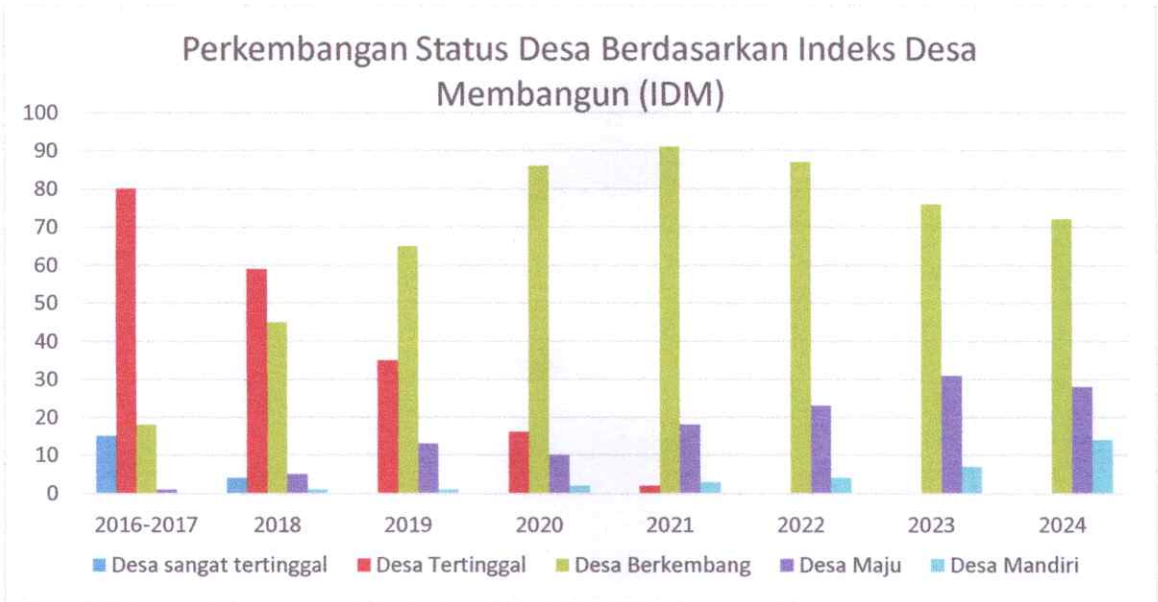
No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah	
1	Tanah	2	Bidang
2	Bangunan kantor	3	Unit
3	Mobil	2	Unit
4	Sepeda Motor	7	Unit
5	Meja	65	Unit
6	Kursi besi	4	Unit
7	Kursi kerja	15	Unit
8	Kursi plastic	46	Unit
9	Kursi Tamu	1	Set
10	Laptop	9	Unit
11	Personal Computer	7	Unit
12	Scaner	2	Unit
13	Printer	7	Unit
14	Global Positioning System	1	Unit
15	Router Mikrotic	2	Unit
16	Air Condition	13	Unit
17	Televisi	1	Unit
18	Infocus	1	Unit
19	Lemari Arsip	4	Unit
20	Lemari Arsip besi	2	Unit
21	Scanner	2	Unit

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22	Tandon air	2	Unit
23	Pompa air	1	Unit
24	Lemari Kaca	1	Unit

II.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, yang salah satunya merubah masa jabatan Kepala desa menjadi 8(delapan) tahun yang semula 6 (enam) tahun. Pengukuran perkembangan desa untuk tahun 2025 juga mengalami perubahan yang semula berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengukur 3 (tiga) dimensi, yaitu ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi, menjadi Indeks Desa yang mengukur 6(enam) dimensi, yaitu; Layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Hal tersebut menyebabkan penurunan jumlah Desa mandiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian kinerja berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024, dari total 114 Desa, sudah ada 14 Desa Mandiri (Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi, Desa Adi Purwa, Desa Dusun Mudo, Desa Kemang Manis, Desa Bukit Harapan, Desa Dataran Kempas, Desa Intan Jaya, Desa Bukit Indah, Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Papauh, Desa Sungai Muluk, Desa Pematang Balam), 28 Desa Maju dan 72 Desa Berkembang, dan tidak ada lagi Desa Tertinggal sejak Tahun 2022, sedangkan untuk Desa sangat tertinggal sudah tidak ada sejak tahun 2019. Ada peningkatan status desa yang disebabkan adanya dukungan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana desa, dan alokasi dana desa, serta bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi Jambi.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel. Status Desa Tahun 2024 berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM) Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Desa berdasarkan IDM				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Tungkal Ilir	2	-	-	2	-	-
2	Tungkal Ulu	9	-	2	7	-	-
3	Bram Itam	9	-	1	8	-	-
4	Betara	11	-	8	3	-	-
5	Pengabuan	12	-	1	11	-	-
6	Seberang Kota	7	-	-	7	-	-
7	Kuala Betara	9	-	-	9	-	-
8	Senyerang	9	-	1	8	-	-
9	Muara Papalik	9	9	-	-	-	-
10	Merlung	9	3	3	3	-	-
11	Renah Mendaluh	9	-	4	5	-	-
12	Batang Asam	10	-	3	7	-	-
13	Tebing Tinggi	9	2	5	2	-	-
Total		114	14	28	72	0	0

Pengukuran perkembangan desa untuk tahun 2025, digunakan Indeks Desa yang mengukur 6 dimensi, yaitu; Layanan dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Hal ini diatur dengan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Untuk status Desa berdasarkan Indeks Desa, terdapat 6 Desa Mandiri, 39 Desa Maju dan 69 Desa Berkembang

15 Provinsi Jambi
1506 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
1506001 Kelurahan
1506002 Desa

TABEL INDEKS DESA TAHUN 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	NAMA KECAMATAN	KODE PUM	NAMA DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SKOR	STATUS INDEKS DESA
1	TUNGKAL ULU	1506012001	BADANG	143	57	103	30	36	66	70,39	MAJU
2		1506012002	TANJUNG TAYAS	105	70	77	57	41	65	61,61	BERKEMBANG
3		1506012003	KUALA DASAL	117	54	82	66	40	63	64,25	BERKEMBANG
4		1506012004	PEMATANG PAUH	108	61	86	51	42	61	62,08	BERKEMBANG
5		1506012006	TAMAN RAJA	121	63	100	48	42	67	68,22	BERKEMBANG
6		1506012017	BRASAU	118	43	98	38	37	77	64,56	BERKEMBANG
7		1506012019	GEMURUH	129	62	96	46	40	61	68,06	BERKEMBANG
8		1506012020	PEMATANG TEMBESU	120	53	81	36	41	59	60,81	BERKEMBANG
9		1506012021	BADANG SEPAKAT	112	55	92	56	37	66	64,28	BERKEMBANG
10	TUNGKAL ILIR	1506022003	TUNGKAL I	95	68	127	56	44	69	69,88	MAJU
11		1506022014	TELUK SIALANG	125	78	109	54	47	67	73,54	MAJU
12	PENGABUAN	1506032006	PARIT PUDIN	102	68	88	46	40	42	59,32	BERKEMBANG
13		1506032007	SUNGAI SERINDIT	104	60	69	38	47	71	57,5	BERKEMBANG
14		1506032008	MEKAR JATI	116	38	70	57	33	66	58,7	BERKEMBANG
15		1506032012	SUNGAI PAMPANG	106	51	84	38	46	52	58,02	BERKEMBANG
16		1506032013	PARIT SIDANG	121	46	85	51	31	63	62,57	BERKEMBANG
17		1506032014	SUNGAI JERING	126	64	101	58	46	71	71,41	MAJU
18		1506032015	PARIT BILAL	113	61	107	47	36	61	66,59	BERKEMBANG
19		1506032016	SUAK SAMIN	101	62	83	42	27	58	57,79	BERKEMBANG
20		1506032017	SUNGAI BAUNG	100	55	108	58	46	48	63,91	BERKEMBANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

21		1506032018	KARYA MAJU	134	66	119	58	45	59	75,73	MAJU
22		1506032019	SUNGAI RAYA	113	65	69	42	44	45	57,61	BERKEMBANG
23		1506032020	PASAR SENIN	127	46	84	48	33	58	62,94	BERKEMBANG
24	BETARA	1506042001	PEMATANG LUMUT	120	51	134	58	47	63	74,67	MAJU
25		1506042008	MAKMUR JAYA	111	62	118	56	33	66	69,85	MAJU
26		1506042009	SERDANG JAYA	105	66	129	62	45	75	73,59	MAJU
27		1506042010	TERJUN GAJAH	133	66	103	50	46	64	71,92	MAJU
28		1506042011	LUBUK TERENTANG	112	62	82	58	31	62	62,45	BERKEMBANG
29		1506042012	PEMATANG BULUH	127	68	89	58	42	78	70,08	MAJU
30		1506042013	MUNTIALO	120	65	103	62	38	72	70,68	MAJU
31		1506042014	TELUK KULBI	111	51	100	57	37	69	65,68	BERKEMBANG
32		1506042015	BUNGA TANJUNG	87	74	128	68	42	76	70,96	MAJU
33		1506042016	SUNGAI TERAP	111	63	116	76	36	69	72,34	MAJU
34		1506042017	MANDALA JAYA	128	53	112	60	49	56	71,79	MAJU
35	MERLUNG	1506052005	PENYABUNGAN	121	80	96	78	41	77	73,62	MAJU
36		1506052006	LUBUK TERAP	155	69	85	45	39	68	72,73	MAJU
37		1506052008	TANJUNG PAKU	121	59	79	62	41	57	64,04	BERKEMBANG
38		1506052012	TANJUNG BENANAK	152	80	140	52	46	74	86,3	MANDIRI
39		1506052013	BUKIT HARAPAN	153	77	124	62	40	72	83,5	MANDIRI
40		1506052014	ADI PURWA	152	81	110	62	37	80	81,49	MANDIRI
41		1506052018	PINANG GADING	144	82	117	86	41	59	82,16	MANDIRI
42		1506052020	MERLUNG	108	33	90	60	49	64	61,65	BERKEMBANG
43		1506052021	TANJUNG MAKMUR	133	48	104	56	38	67	70,66	MAJU
44	TEBING TINGGI	1506062002	PURWODADI	164	67	155	72	39	72	92,18	MANDIRI
45		1506062003	SUKA DAMAI	140	65	103	50	34	80	74,19	MAJU

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

46		1506062004	ADI JAYA	119	65	103	50	34	79	69,55	MAJU
47		1506062005	KELAGIAN	101	51	104	44	31	61	61,65	BERKEMBANG
48		1506062006	TELUK PENGKAH	121	65	80	46	41	51	62,45	BERKEMBANG
49		1506062007	TALANG MAKMUR	109	48	89	56	42	63	62,28	BERKEMBANG
50		1506062008	SUNGAI KERUH	127	63	118	50	34	70	73,2	MAJU
51		1506062009	DATARAN KEMPAS	151	66	142	66	47	77	86,95	MANDIRI
52		1506062010	DELIMA	144	56	116	78	28	76	79,14	MAJU
53	BATANG ASAM	1506072002	SRI AGUNG	136	65	125	54	40	71	77,72	MAJU
54		1506072003	SUBAN	150	66	119	63	41	53	78,9	MAJU
55		1506072004	TANJUNG BOJO	104	64	97	56	41	65	64,69	BERKEMBANG
56		1506072005	KAMPUNG BARU	139	37	132	49	49	58	75,45	MAJU
57		1506072006	LUBUK BERNAI	100	51	91	54	30	65	60,28	BERKEMBANG
58		1506072007	RAWA MEDANG	119	26	100	42	35	62	62,15	BERKEMBANG
59		1506072008	SUNGAI PENOBAN	138	68	106	72	46	61	76,04	MAJU
60		1506072009	RAWANG KEMPAS	116	56	91	42	36	74	64,2	BERKEMBANG
61		1506072010	LUBUK LAWAS	111	65	75	58	35	71	62,3	BERKEMBANG
62		1506072011	SUNGAI BADAR	122	60	101	42	37	72	67,82	BERKEMBANG
63	RENAH MENDALUH	1506082002	PULAU PAUH	126	52	75	54	49	60	63,45	BERKEMBANG
64		1506082003	RANTAU BENAR	117	73	83	49	40	69	65,17	BERKEMBANG
65		1506082004	LAMPISI	99	63	118	44	43	67	66,73	BERKEMBANG
66		1506082005	CINTA DAMAI	128	74	103	50	40	60	70,92	MAJU
67		1506082006	SUNGAI ROTAN	116	71	78	49	40	69	63,72	BERKEMBANG
68		1506082007	MUARA DANAU	119	61	89	60	40	50	64,85	BERKEMBANG
69		1506082008	TANAH TUMBUH	109	73	78	48	39	59	61,23	BERKEMBANG
70		1506082009	SUNGAI PAUR	88	66	99	48	35	69	60,97	BERKEMBANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

71		1506082010	BUKIT BAKAR	116	66	66	42	33	52	57,77	BERKEMBANG
72	MUARA PAPALIK	1506092002	DUSUN MUDO	120	66	99	54	41	76	69,66	MAJU
73		1506092003	INTAN JAYA	105	36	107	53	41	66	63,68	BERKEMBANG
74		1506092004	BUKIT INDAH	127	53	119	41	41	62	70,93	MAJU
75		1506092005	KEMANG MANIS	124	40	106	62	40	73	69,69	MAJU
76		1506092006	RANTAU BADAK LAMO	130	65	90	49	38	65	68	BERKEMBANG
77		1506092007	LUBUK SEBONTAN	135	69	121	48	45	63	75,94	MAJU
78		1506092008	SUNGAI PAPAUH	100	53	116	68	41	62	67,57	BERKEMBANG
79		1506092009	SUNGAI MULUK	145	49	104	56	39	66	73,33	MAJU
80		1506092010	PEMATANG BALAM	109	65	116	58	40	70	70,42	MAJU
81	SEBERANG KOTA	1506102002	TUNGKAL IV DESA	140	60	104	58	46	70	74,51	MAJU
82		1506102003	KUALA BARU	127	59	60	60	47	64	62,34	BERKEMBANG
83		1506102004	TELUK PULAI RAYA	93	65	111	41	45	71	64,42	BERKEMBANG
84		1506102005	MEKAR ALAM	122	48	103	47	45	62	66,99	BERKEMBANG
85		1506102006	HARAPAN JAYA	130	65	98	56	39	52	69,17	BERKEMBANG
86		1506102007	KUALA KAHAR	118	70	101	54	42	54	67,9	BERKEMBANG
87		1506102008	MUARA SEBERANG	101	50	102	56	25	62	62,23	BERKEMBANG
88	BRAM ITAM	1506112002	BRAM ITAM KANAN	128	62	97	47	38	65	68,44	BERKEMBANG
89		1506112003	TANJUNG SENJULANG	109	43	87	46	49	60	60,33	BERKEMBANG
90		1506112004	PEMBENGIS	127	60	115	50	49	69	73,12	MAJU
91		1506112005	BRAM ITAM RAYA	134	61	128	57	45	72	78,23	MAJU
92		1506112006	PANTAI GADING	114	41	107	49	41	56	64,69	BERKEMBANG
93		1506112007	JATI EMAS	112	59	97	44	40	62	64,14	BERKEMBANG
94		1506112008	KEMUNING	104	75	82	52	34	61	61,53	BERKEMBANG
95		1506112009	MEKAR TANJUNG	103	69	104	42	47	56	64,31	BERKEMBANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

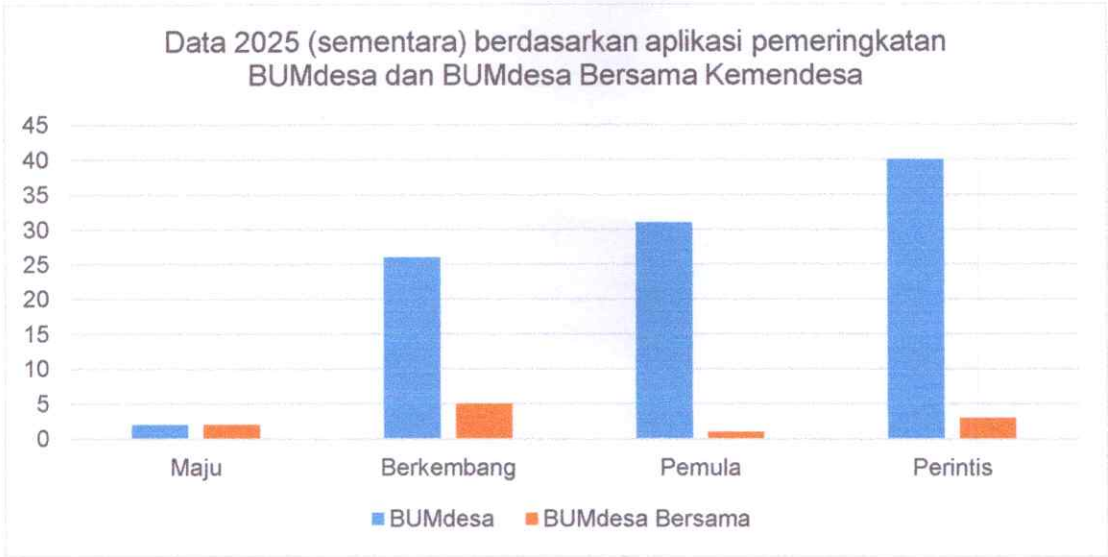
96		1506112010	SEMAU	104	41	81	37	41	72	57,5	BERKEMBANG
97	KUALA BETARA	1506122002	SUNGAI DUALAP	134	69	117	62	40	72	77,11	MAJU
98		1506122003	BETARA KANAN	100	68	81	59	44	70	62,05	BERKEMBANG
99		1506122004	SUNGAI GEBAR	101	71	87	45	41	59	60,9	BERKEMBANG
100		1506122005	DATARAN PINANG	96	64	74	62	40	61	58,51	BERKEMBANG
101		1506122006	TANJUNG PASIR	96	71	92	58	41	65	62,94	BERKEMBANG
102		1506122007	SUNGAI GEBAR BARAT	102	76	107	50	36	59	65,98	BERKEMBANG
103		1506122008	SUNGAI DUNGUN	124	47	76	38	38	68	60,97	BERKEMBANG
104		1506122009	KUALA INDAH	123	72	71	52	44	55	63,09	BERKEMBANG
105		1506122010	SUAK LABU	113	72	71	52	44	55	60,93	BERKEMBANG
106	SENERANG	1506132002	SUNGAI KAYU ARO	103	65	83	40	38	43	57,49	BERKEMBANG
107		1506132003	TELUK KETAPANG	132	64	107	43	46	51	70,18	MAJU
108		1506132004	SUNGAI RAMBAI	128	76	109	56	40	69	73,96	MAJU
109		1506132005	MARGO RUKUN	108	60	93	49	34	55	62,05	BERKEMBANG
110		1506132006	KEMPAS JAYA	118	74	116	48	43	54	70,75	MAJU
111		1506132007	LUMAHAN	111	49	122	46	41	70	69,03	BERKEMBANG
112		1506132008	SUNGAI LANDAK	100	53	97	46	42	60	61,06	BERKEMBANG
113		1506132009	SUNGSANG	87	56	101	51	35	64	59,92	BERKEMBANG
114		1506132010	SUNGAI KEPAYANG	108	52	108	42	38	42	62,37	BERKEMBANG

Keterangan:
Desa Mandiri : 6
Desa Maju : 39
Desa Berkembang : 69
Jumlah Desa Keseluruhan : 114

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUMDesa masih banyak yang belum menghasilkan, dikarenakan kurangnya modal dan kurangnya SDM pengelola BUMDesa dalam persiapan dan perencanaan pendirian BUMDesa.

BUMDesa yang terbentuk sudah 113 dari 114 Desa, Desa Teluk Ketapang yang belum membentuk BUMDesa. BUMDesa Bersama telah terbentuk setiap kecamatan (13 BUMdesa Bersama). Kualitas Lembaga kemasyarakatan yang masih belum optimal dan juga kapasitas aparatur pemerintahan desa yang masih perlu pembinaan dan ditingkatkan.



TABEL KLASIFIKASI BUMDESA BERSAMA DATA SEMESTER I TAHUN 2024 APLIKASI KEMENDESA

NO	KECAMATAN	BUMDESA BERSAMA	KLASIFIKASI			
			MAJU	BERKEMBANG	PEMULA	PERINTIS
1	TUNGKAL ULU	TUNGKAL ULU LKD				
2	TUNGKAL ILIR	MITRA BERSAUDARA LKD		√		
3	PENGABUAN	USAHA BERKAH PENGABUAN		√		
4	BETARA	BETARA LKD	√			
5	MERLUNG	MERLUNG JAYA BERSAMA			√	
6	TEBING TINGGI	TEBING SEJAHTERA	√			
7	BATANG ASAM	ASTAN JAYA		√		
8	RENAH MENDALUH	RENAH MENDALUH SEJAHTERA				√
9	MUARA PAPALIK	PAPALIK BERKAH				
10	SEBERANG KOTA	SEKO BERKAH				√
11	BRAM ITAM	MAYANG MANGURAI		√		
12	KUALA BETARA	KUBE SEJAHTERA				
13	SENYERANG	SEJAHTERA SENYERANG		√		
JUMLAH			2	5	1	2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TABEL KLASIFIKASI BUM DESA SEMESTER I TAHUN 2024 APLIKASI KEMENDESA

NO	KECAMATAN	DESA	BUMDESA	KLASIFIKASI			
				MAJU	BERKEMBANG	PEMULA	PERINTIS
1	TUNGKAL ULU	BADANG	USAHA MAJU BADANG			v	
2		TANJUNG TAYAS	BUNGO TANJUNG				
3		KUALA DASAL	JABUNG CIPTA USAHA				
4		PEMATANG PAUH	LEGON JAYA				
5		TAMAN RAJA	MANDAH JAYA MANDIRI				
6		BRASAU	KARYA BERSAMA				v
7		GEMURUH	BINA KARYA SEJAHTERA				
8		PEMATANG TEMBESU	USAHA JAYA BERSAMA				
9		BADANG SEPAKAT	RAHAYU LESTARI				
10	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL I	MAJU BERSAMA				v
11		TELUK SIALANG	KARYA BERSAMA			v	
12	PENGABUAN	PARIT PUDIN	PUDIN JAYA			v	
13		SUNGAI SERINDIT	TRI KARSA			v	
14		MEKAR JATI	JATI MAKMUR		v		
15		SUNGAI PAMPANG	BERKAH		v		
16		PARIT SIDANG	SIDANG JAYA			v	
17		SUNGAI JERING	ADHI MUKTI		v		
18		PARIT BILAL	SUMBER MAKMUR			v	
19		SUAK SAMIN	SUMBER KENCANA		v		
20		SUNGAI BAUNG	ASTANA		v		
21		KARYA MAJU	BERDIKARI		v		
22		SUNGAI RAYA	USAHA BERSAMA			v	
23		PASAR SENIN	USAHA BERSAMA			v	
24	BETARA	PEMATANG LUMUT	KARYA BAKTI BERSAMA			v	
25		MAKMUR JAYA	BANGKIT BERSAMA				v
26		SERDANG JAYA	TEGAR GEMILANG		v		
27		TERJUN GAJAH	FUJIKU ARTOMORO		v		
28		LUBUK TERENTANG	LUTER BERSATU		v		
29		PEMATANG BULUH	CAHAYA BERKAH		v		
30		MUNTIALO	BINA LESTARI		v		
31		TELUK KULBI	JADI MULYA		v		
32		BUNGA TANJUNG	KARYA BAKTI			v	
33		SUNGAI TERAP	AMANAH			v	
34		MANDALA JAYA	MANDALA KRIDA				v
35	MERLUNG	PENYABUNGAN	BERKAH				v
36		LUBUK TERAP	USAHO BERSAMO				v
37		TANJUNG PAKU	TANGGO LARIK				v
38		TANJUNG BENANAK	BENANAK JAYA				
39		BUKIT HARAPAN	YAKUSA				v
40		ADI PURWA	BUMI MAKMUR				v
41		PINANG GADING	PINANG GADING JAYA				v

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

42		MERLUNG	MERLUNG MAJU				v
43		TANJUNG MAKMUR	MAKMUR BERSAMA		v		
44	TEBING TINGGI	PURWODADI	MANDIRI SEJAHTERA		v		
45		SUKA DAMAI	MAKMUR SEJAHTERA		v		
46		ADI JAYA	KARYA BERSAMA DELIMA	v			
47		KELAGIAN	KELAGIAN INDAH BERSAMA				v
48		TELUK PENGKAH	MULIA				v
49		TALANG MAKMUR	TALANG MAKMUR				v
50		SUNGAI KERUH	SUMBER REJEKI		v		
51		DATARAN KEMPAS	GERBANG NUSANTARA			v	
52		DELIMA	KARYA BERSAMA	v			
53	BATANG ASAM	SRI AGUNG	MAJU JAYA				v
54		SUBAN	USAHA BERSAMA			v	
55		TANJUNG BOJO	USAHA MAJU MANDIRI			v	
56		KAMPUNG BARU	PESAPUAN JAYA MANDIRI				v
57		LUBUK BERNAI	SEJAHTERA BERSAMA				
58		RAWA MEDANG	MAJU BERSAMA				v
59		SUNGAI PENOBAN	CAHAYA PENOBAN				
60		RAWANG KEMPAS	PUTRI SRIKANDI				
61		LUBUK LAWAS	BINA KARYA BERSAMA				
62		SUNGAI BADAR	JAYA BERSAMA				v
63	RENAH MENDALUH	PULAU PAUH	TANJUNG JELMU				v
64		RANTAU BENAR	BANGKIT BERJAYA				v
65		LAMPISI	LAMPISI JAYA			v	
66		CINTA DAMAI	JAYA KUSUMA				v
67		SUNGAI ROTAN	SUNGAI SEJAHTERA				v
68		MUARA DANAU	KARYA SEJAHTERA			v	
69		TANAH TUMBUH	TUMBUH BAROEKAH			v	
70		SUNGAI PAUR	PAUH JAYA BERSAMA				v
71		BUKIT BAKAR	SUMBER MULIA				v
72	MUARA PAPALIK	DUSUN MUDO	KEMOTAI JAYA		v		
73		INTAN JAYA	JAYA MAKMUR		v		
74		BUKIT INDAH	MAJU BERSAMA			v	
75		KEMANG MANIS	KEMANG NIAGA MANDIRI		v		
76		RANTAU BADAK LAMO	KEMAMBAI SEJAHTERA			v	
77		LUBUK SEBONTAN	TIRTA MUKTI				
78		SUNGAI PAPAUH	MEKAR JAYA		v		
79		SUNGAI MULUK	BINA SEJAHTERA				
80		PEMATANG BALAM	USAHA MAJU BERSAMA		v		
81	SEBERANG KOTA	TUNGKAL IV DESA	DAMAI SEJAHTERA				v
82		KUALA BARU	MAJU SEJAHTERA				v
83		TELUK PULAI RAYA	BHAKTI USAHA				v
84		MEKAR ALAM	SUMBER MAKMUR				v
85		HARAPAN JAYA	JAYA USAHA				v
86		KUALA KAHAR	USAHA BERSAMA				v

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

87		MUARA SEBERANG	MUARA SEBERANG				√
88	BRAM ITAM	BRAM ITAM KANAN	PRAMBANAN			√	
89		TANJUNG SENJULANG	TANJUNG SENJULANG			√	
90		PEMBENGIS	SEDERHANA		√		
91		BRAM ITAM RAYA	RAYA		√		
92		PANTAI GADING	SUMBER BERKAH		√		
93		JATI EMAS	SEPAH BERUANG			√	
94		KEMUNING	USAHA KEMUNING		√		
95		MEKAR TANJUNG	GEMILANG			√	
96		SEMAU	KARYA GEMILANG			√	
97	KUALA BETARA	SUNGAI DUALAP	ANUGRA SUNGAI DUALAP			√	
98		BETARA KANAN	BINA USAHA				√
99		SUNGAI GEBAR	SEJAHTERA			√	
100		DATARAN PINANG	PINANG RAYA				√
101		TANJUNG PASIR	MANDIRI JAYA				√
102		SUNGAI GEBAR BARAT	FAJAR KENCANA			√	
103		SUNGAI DUNGUN	MAJU GEMILANG			√	
104		KUALA INDAH	MARDAH				√
105		SUAK LABU	MAJU JAYA			√	
106	SENYERANG	SUNGAI KAYU ARO	SADAR USAHA				√
107		TELUK KETAPANG	BELUM ADA				
108		SUNGAI RAMBAI	RAMBAI JAYA				√
109		MARGO RUKUN	MARGO SENTOSA				√
110		KEMPAS JAYA	JAYA LESTARI		√		
111		LUMAHAN	JAYA BERSAMA				√
112		SUNGAI LANDAK	CIPTA KARYA				√
113		SUNGSANG	SUNGSANG MAKMUR			√	
114		SUNGAI KEPAYANG	MAJU SEJAHTERA			√	
JUMLAH				2	26	31	40

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				4.206	4.206	4.206	4.206	4.206	4.543	4.258	4.770	4.967	108%	101%	113%	118%	
3	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5			Persentase pengentasan desa tertinggal		87,50%	100%	100%	100%	100%	87,50%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	
6			Persentase peningkatan status desa mandiri		0%	1,10%	1,09%	1,08%	1,07%	12,79%	6,59%	13,79%	5,26%		599%	1265%	492%	

Kuala Tungkal, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MUHAMMAD NATSIR, S.I.P
NIP. 19840624 201101 1 005

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penguatan Desa	121.100.000	-	99.362.000	67.262.000	64.362.000	108.325.000	-	20.490.000	39.090.000	-	87%		21%	58%		(14.184.500)	(26.331.250)
Kegiatan penyelenggaraan penguatan desa	121.100.000	-	99.362.000	67.262.000	64.362.000	108.325.000	-	20.490.000	39.090.000	-	87%		21%	58%		(14.184.500)	(26.331.250)
Sub kegiatan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	32.900.000		99.362.000	67.262.000	64.362.000	27.800.000		20.490.000	39.090.000		84%		21%	58%		7.865.500	(6.950.000)
Sub kegiatan fasilitasi tata wilayah desa	88.200.000					77.525.000					88%					(22.050.000)	(19.381.250)
Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	37.548.818	-	-	-	-	34.178.818	-	-	-		91%				-	-
Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	-	37.548.818	-	-	-	-	34.178.818	-	-	-		91%				-	-
Sub kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan		37.548.818					34.178.818					91%				-	-
Program Administrasi Pemerintahan Desa	366.341.142	2.519.876.391	662.786.500	1.071.050.200	1.027.019.800	340.741.120	2.400.665.211	525.133.000	881.335.000	-	93%	93%	79%	82%	0%	165.169.665	(85.185.280)
Kegiatan Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	366.341.142	2.519.876.391	662.786.500	1.071.050.200	1.027.019.800	340.741.120	2.400.665.211	525.133.000	881.335.000	-	93%	95%	79%	82%	0%	165.169.665	(85.185.280)
Sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33.374.750					33.374.750	33.374.750				100%					(8.343.688)	(8.343.688)
Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa				161.000.000					130.625.000					81%		-	-
Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa																-	-
Sub kegiatan Fasilitasi pengalokasian keuangan desa	161.099.750	150.450.000	176.500.000	146.600.000	141.937.000	136.999.750	147.600.000	161.000.000	119.480.000		83%	98%	91%	82%	0%	(4.790.688)	(34.249.938)
Sub kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		306.557.991	77.393.000	124.171.000	126.956.000		272.957.801	61.603.000	118.571.000			89%	80%	95%	0%	31.739.000	-

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerisnama antar desa	54.466.642	72.065.000	94.358.000	82.675.200	71.692.000	54.466.620	72.065.000	87.858.000	49.500.000		100%	100%	93%	60%	0%	4.306.340	(13.616,65)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, pengungkapan dan pemberhentian kepala desa		1.465.778.410			39.750.000		1.458.602.660				100%	100%			0%	9.937.500	-
Sub Kegiatan Fasilitas penunsaun profil desa	12.000.000	59.900.000	44.825.000	44.825.000	44.450.000	12.000.000	59.900.000	44.275.000	44.825.000		100%	100%	99%	100%	0%	8.112.500	(3.000,00)
Sub Kegiatan Fasilitas pengeloan aset desa	26.400.000	60.450.000	65.300.000	59.250.000	51.788.000	26.400.000	57.900.000	53.780.000	54.950.000		100%	96%	82%	93%	0%	6.347.000	(6.600,00)
Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan Kapasitas anggota BPP				241.379.000	209.907.000				204.384.000					85%	0%	52.476.750	-
Sub Kegiatan Fasilitas penetiapan dan pengasan batas desa		295.424.990	114.559.000	94.850.000	158.350.000		197.625.000	27.884.000	42.700.000			67%	24%	45%	0%	39.587.500	-
Sub Kegiatan pembinaan laporan kepala desa					57.639.800									0%	0%	14.409.950	-
Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	79.000.000	109.250.000	90.051.500	116.500.000	124.550.000	77.590.000	100.640.000	88.733.000	116.500.000		98%	92%	99%	100%	0%	11.387.500	(19.375,00)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.081.001.896	1.283.323.450	1.429.180.900	1.450.185.850	1.332.081.000	604.970.913	1.055.767.679	1.168.699.630	822.553.270	-	58%	82%	82%	57%	0%	70.269.776	(151.242,728)
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksanaanya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	1.051.001.896	1.283.323.450	1.429.180.900	1.450.185.850	1.332.081.000	604.970.913	1.055.767.679	1.168.699.630	822.553.270	-	58%	82%	82%	57%	0%	70.269.776	(151.242,728)
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/ Kelurahan dan Masyarakat hukum adat	913.252.171	235.624.750	212.981.000	158.537.400	158.781.000	546.320.913	233.602.750	199.581.000	83.901.400		60%	99%	94%	53%	0%	(188.617,793)	(136.580,228)
Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	137.749.725	147.699.344	66.200.000	21.950.000	73.300.000	58.650.000	74.100.000	64.500.000	21.950.000		43%	50%	97%	100%	0%	(16.112,431)	(14.662,50)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan keseljahteraan keluarga	899.999.356	1.149.999.900	1.269.398.450	1.100.000.000		748.064.929	904.818.630	716.701.870			83%	79%	96%	0%	275.000.000	-
--	-------------	---------------	---------------	---------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--	-----	-----	-----	----	-------------	---

Pada table T-C.23, Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah yang baik, tercapai 100% kecuali pada tahun 2024 dikarenakan adanya kebakaran kantor Desa suak labu. Sejak tahun 2022, sudah tidak ada lagi Desa tertinggal dan sejak tahun 2019 tidak ada lagi desa sangat tertinggal.

Pada table T-C. 24, program penataan desa dan program administrasi pemerintahan desa pada tahun 2021 rasio anggaran dan realisasi yang cukup baik sedangkan tahun 2023-2024 kurang baik, program fasilitasi peningkatan kerjasama desa rasio anggaran dan realisasi tahun 2022 baik, dan program administrasi pemerintahan desa rasio anggaran dan realisasi tahun 2021 sampai 2024 baik, sedangkan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat kurang baik pada tahun 2021 dan 2024, di tahun 2022 dan 2023 baik.

II.1.d. Kelompok sasaran layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kelompok layanan masyarakatnya adalah Aparatur Pemerintahan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.2.a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

RPJMN 2025-2029 menjadikan prioritas mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan indikator persentase desa mandiri. Melalui intervensi penguatan ekonomi lokal, ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan serta tata Kelola dan pemberdayaan desa adaptif.

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional, dalam rangka mengurangi kesenjangan nasional, dengan adanya undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar desa. Dana yang cukup besar ini menjadi tantangan agar pengelolaan keuangan desa tidak terjadi inefisiensi dan tidak tepat sasaran, pendampingan desa diperlukan untuk membantu desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa perlu mendapat bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Target sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 yang kedua adalah Meningkatkan produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi industri berbasis SDA dengan arah pembangunan Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan indikator kinerja Persentase desa mandiri.

Tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain;

1. Terbatasnya kompetensi perangkat desa dalam rangka pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
2. Kinerja Lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal dalam mendorong program pembangunan.
3. Kecenderungan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dampak dari penggunaan obat terlarang dan judi on-line.
4. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat.
5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan.
6. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Peluang kedepan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa adalah;

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth)
2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat.
3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
4. Keterbukaan informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang

Untuk penanganan kondisi kemiskinan ekstrim, sangat diperlukan usaha dan dana yang besar untuk dapat memperbaiki keadaan ini. Pengembangan BUM desa dan BUM desa bersama sangat diperlukan untuk membantu kemandirian desa, sehingga adanya peningkatan status pembangunan desa.

Pembangunan dalam memajukan masyarakat dan desa yang berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal, yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dipandang peluang karena dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa.

Dipandang sebagai tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa yang berpotensi pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintahan desa, karena itu perlunya pembinaan terhadap desa.

Kawasan perdesaan merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki perang penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

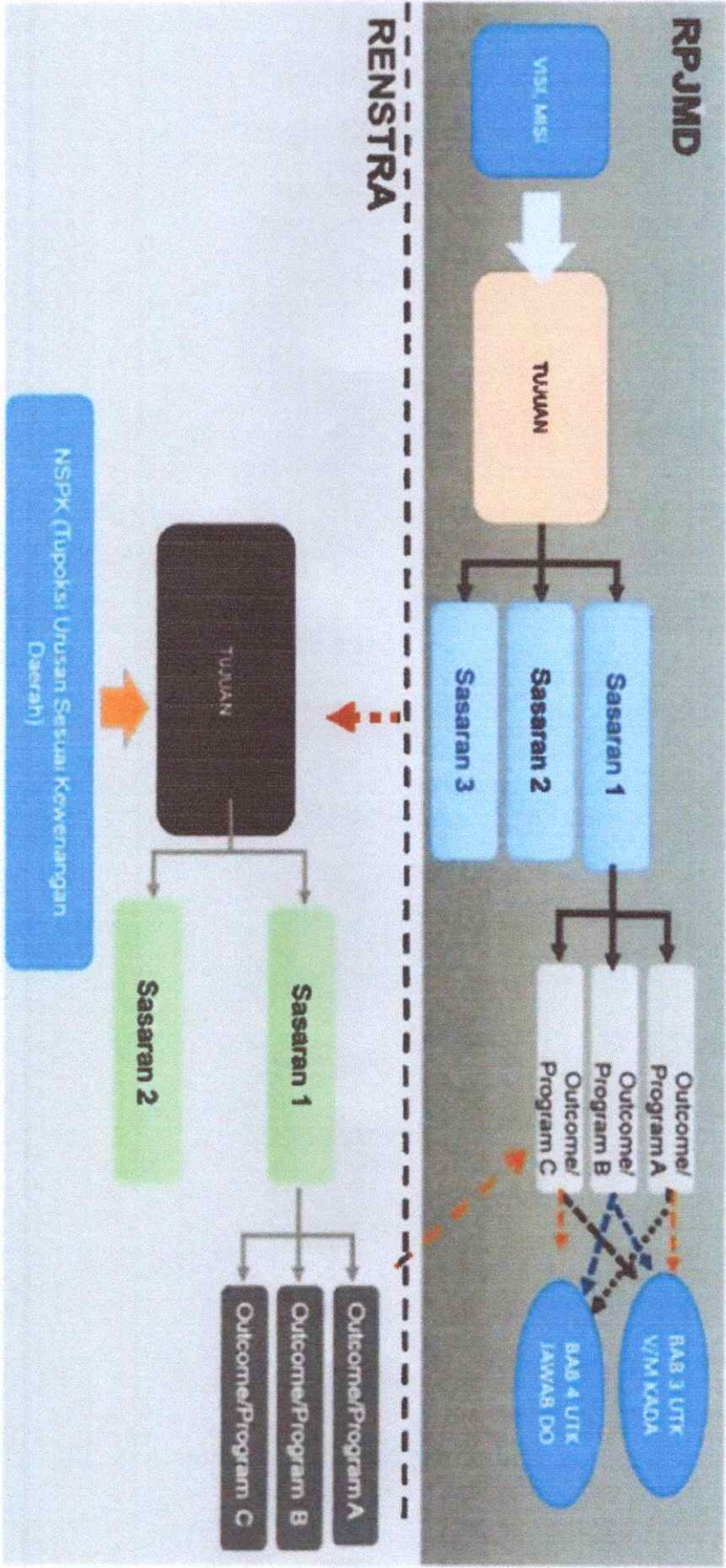
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya 114 Pemerintahan Desa	Masih kurangnya kuantitas dan kapabilitas SDM Dinas PMD terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi	Pengelolaan Persampahan yang ada di Desa	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati	93% Sumber penghasilan utama dari sektor primer	Wilayah sumatera 50% dari PDRB berasal dari sektor primer	Perlunya pendampingan Desa
Adanya bantuan dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan bersifat khusus	Masih kurangnya kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa	Ketersediaan air bersih dan sanitasi di desa	Kerja sama kawasan menciptakan perdagangan strategis	kemandirian fiskal desa rendah (2% dari total APBdes bersumber dari PADes)	tingkat kemiskinan rata-rata sumatera masih 14 %	Peningkatan kerja sama desa
Adanya lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Masih kurang optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa		Adanya era digitalisasi	10% Desa yang sudah memiliki PADes, 90% nya berada di bawah angka Rp100juta		Pengelolaan keuangan dan aset desa secara digital
Adanya 113 BUMdesa dan 13 BUM desa bersama	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan			Tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 12,22% (diatas tingkat kemiskinan nasional 9,36%)		Pengelolaan BUMdesa dan BUMdesa bersama belum optimal
	Masih rendahnya kerja sama antar desa			Rasio gini perdesaan adalah 0,313 atau lebih merata dari perkotaan 0,409		Perlunya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi di desa			Akses ke air minum layak dan sanitasi layak di perdesaan mencapai 84,93% dan 76,98% (BPS,2023)		Peningkatan Pemanfaatan teknologi di Desa
				Akses layanan kesehatan dasar perdesaan 75,37% dan lama sekolah hanya 7,88 tahun (BPS,2023)		
				Diperlukan penguatan relasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu dan berkelanjutan		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



TABEL TC.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi)			
MISI III : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian desa		Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan perangkat desa serta pengurus BUM desa
		Mendorong terbentuk dan aktifnya BUM desa dan BUM desa bersama serta peningkatan kerjasama desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) untuk peningkatan perekonomian desa	Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi
		Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Melakukan pembinaan terhadap PosyanteK, posyandu, kelompok usaha ekonomi masyarakat dan Kelompok PKK

Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa (Rata-rata)	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	
			Persentase Desa Mandiri	5,26%	7,02%	8,77%	10,53%	12,28%	14,04%	
	Meningkatnya desa Maju	Persentase Desa Maju	34,21%	36,84%	38,60%	40,35%	42,11%	43,86%		

Tabel Penahapan Renstra PD

Tahap (I) 2026	Tahap (II) 2027	Tahap (III) 2028	Tahap (IV) 2029	Tahap (V) 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan terhadap 2 Desa (Desa Sungai Ari, Kecamatan Batang Asam dan Desa Rimbo Asri, Kecamatan Tebing Tinggi) Memfasilitasi kerja sama desa	Penataan terhadap 2 Desa (Desa Sungai Ari, Kecamatan Batang Asam dan Desa Rimbo Asri, Kecamatan Tebing Tinggi) Memfasilitasi kerja sama desa	Penataan terhadap 2 Desa (Desa Sungai Ari, Kecamatan Batang Asam dan Desa Rimbo Asri, Kecamatan Tebing Tinggi) Memfasilitasi kerja sama desa	Penataan terhadap 2 Desa (Desa Sungai Ari, Kecamatan Batang Asam dan Desa Rimbo Asri, Kecamatan Tebing Tinggi) Memfasilitasi kerja sama desa	Penataan terhadap 2 Desa (Desa Sungai Ari, Kecamatan Batang Asam dan Desa Rimbo Asri, Kecamatan Tebing Tinggi) Memfasilitasi kerja sama desa
Pembinaan terhadap penyelenggaraan 114 pemerintahan desa	Pembinaan terhadap penyelenggaraan 114 pemerintahan desa	Pembinaan terhadap penyelenggaraan 114 pemerintahan desa	Pembinaan terhadap penyelenggaraan 114 pemerintahan desa	Pembinaan terhadap penyelenggaraan 114 pemerintahan desa
Penataan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi, BUMdesa dan kelompok usaha	Penataan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi, BUMdesa dan kelompok usaha	Penataan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi, BUMdesa dan kelompok usaha	Penataan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi, BUMdesa dan kelompok usaha	Peningkatan keterlibatan generasi muda dan inovator lokal dalam pengembangan produk unggulan
Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penangnanan stunting	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penangnanan stunting	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penangnanan stunting	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penangnanan stunting	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penangnanan stunting
Pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan Kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan	Pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa, anggota BPD, pengurus BUMdesa dan BUMdesa bersama	
		Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa	
		Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pelatihan anggota BPD	
		Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi desa	Pemetaan potensi desa dalam aplikasi prodeskel	
		Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan BUMDesma	Pembinaan dan Pelatihan bagi Pengurus BUMdes dan BUMdesma	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIA TAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	(T1). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	(S1.1) Meningkatkan Desa Maju	(OC1.1.1) Meningkatkan kualitas penataan Desa	(OT1.1.1.1) Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Desa	(T1) Indeks Desa (Rata-rata) Persentase Desa Mandiri (S1.1) Persentase Desa Maju	(Prog.1) Program Penataan Desa (Keg.1.1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

				Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	(Subkeg.1.1.1) Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	
		(OC1.1.2) Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa		(OT1.1.2.1) Meningkatnya Kerja Sama antar Desa yang difasilitasi	(OC1.1.2) Persentase fasilitasi kerja sama desa	(Prog.2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
					(OT1.1.2.1) Persentase Kerja Sama antar Desa yang difasilitasi	(Keg.2.1) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
				Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	(SubKeg.2.1.1) Sub kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	
		(OC1.1.3) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			(OC1.1.3) Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang di tingkatkan kapasitasnya	(Prog.3) Program Administrasi Pemerintahan Desa	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				(OC1.1.3) Persentase desa yang menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan		
				(OC1.1.3) Persentase BUMdesa dan Bumdesa bersama yang telah mencapai pemerinkkatan dengan status berkembang dalam aplikasi pemerinkkatan kemendesa		
			(OT1.1.3.1) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(OT1.1.3.1) Persentase aparatur desa yang dibina	(Keg.3.1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Terlaksananya Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitas penyusunan produk hukum desa	(Subkeg.3.1.1) Subkegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	(Subkeg.3.1.2) Subkegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	
				Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	(Subkeg.3.1.3) Subkegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
				Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	(Subkeg.3.1.4) Subkegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah laporan Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	(Subkeg.3.1.5) Subkegiatan Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	
				Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	(Subkeg.3.1.6) Subkegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				Terselenggarakan nya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	(Subkeg.3.1.7) Subkegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	
				Terlaksananya Fasilitasi penyusunan profil Desa	Jumlah dokumen profil Desa yang tersusun	(Subkeg.3.1.8) Subkegiatan Fasilitasi penyusunan profil Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan aset Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengelolaan aset Desa	(Subkeg.3.1.9) Subkegiatan Fasilitasi pengelolaan aset Desa	
				Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	(Subkeg.3.1.10) Subkegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	(Subkeg.3.1.10) Subkegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	
				Terlaksananya Fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa	(Subkeg.3.1.11) Subkegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

			Tertaksananya Fasilitasi evaluasi perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	(Subkeg.3.1.12) Subkegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	
		(OC1.1.4) Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan		(OC1.1.4) Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	(Prog.4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

				(OT1.1.4.1) Meningkatnya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat hukum adat yang masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	(OT1.1.4.1) Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	(Keg.4.1) Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat hukum adat yang masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	
--	--	--	--	---	---	--	--

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkatkan kapasitasnya	(Subkeg.4.1.1) Subkegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Terlaksananya Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	(Subkeg.4.1.2) Subkegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	(Subkeg.4.1.3) Subkegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				Terlaksananya Fasilitasi tim penggerak PKK penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tim penggerak PKK penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	(Subkeg.4.1.4) Subkegiatan Fasilitasi tim penggerak PKK penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	
--	--	--	--	---	--	--	--

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOM E/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASE LINE 2024											
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Rp14.164.620.000		Rp16.082.727.400		Rp13.686.192.718		Rp14.546.315.908		Rp18.126.293.291		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA													
Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan yang Efisien dan Efektifitas	Nilai IKM	82,10	84		85		86		87		88		
	Nilai SAKIP	67,20	73		74		75		76		77		
	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Rp 7.631.820.000		Rp 7.005.147.400		Rp 7.217.707.718		Rp 7.606.947.258		Rp 8.175.083.566	
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
Meningkatnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen tahunan yang disusun	6 doku men	6 doku men	Rp 70.000.000	6 doku men	Rp 74.900.000	6 doku men	Rp 80.143.000	6 doku men	Rp 85.753.010	6 doku men	Rp 91.755.721	
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD													

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Rp 70.000.000	8 Laporan	Rp 74.900.000	8 Laporan	Rp 80.143.000	8 Laporan	Rp 85.753.010	8 Laporan	Rp 91.755.721
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah												
Meningkatnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	1 doku men	1 doku men	Rp 4.250.000.000	1 doku men	Rp 4.547.500.000	1 doku men	Rp 4.865.825.000	1 doku men	Rp 5.206.432.750	1 doku men	Rp 5.570.883.043
Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN												
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang / bulan	30 orang / bulan	Rp 4.000.000.000	30 orang / bulan	Rp 4.280.000.000	30 orang / bulan	Rp 4.579.600.000	30 orang / bulan	Rp 4.900.172.000	30 orang / bulan	Rp 5.243.184.040
Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN												
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 doku men	12 doku men	Rp 250.000.000	12 doku men	Rp 267.500.000	12 doku men	Rp 286.225.000	12 doku men	Rp 306.260.750	12 doku men	Rp 327.699.003
Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah												
Meningkatnya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	100%	Rp 95.400.000	100%	Rp 102.078.000	100%	Rp 109.223.460	100%	Rp 116.869.102	100%	Rp 125.049.939
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya												

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	146 Paket	115 paket	Rp 76.400.000	115 paket	Rp 81.748.000	115 paket	Rp 87.470.360	115 paket	Rp 93.593.285	115 paket	Rp 100.144.815
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi												
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang	Rp 19.000.000	3 orang	Rp 20.330.000	3 orang	Rp 21.753.100	3 orang	Rp 23.275.817	3 orang	Rp 24.906.124
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah												
Meningkatnya Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	Rp 934.420.000	100%	Rp 999.829.400	100%	Rp 1.069.817.458	100%	Rp 1.144.704.680	100%	Rp 1.224.834.007
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp 11.000.000	12 Paket	Rp 11.770.000	12 Paket	Rp 12.593.900	12 Paket	Rp 13.475.473	12 Paket	Rp 14.418.756
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp 48.000.000	12 Paket	Rp 51.360.000	12 Paket	Rp 54.955.200	12 Paket	Rp 58.802.064	12 Paket	Rp 62.918.208
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	896 Paket	940 paket	Rp 21.420.000	940 paket	Rp 22.919.400	940 paket	Rp 24.523.758	940 paket	Rp 26.240.421	940 paket	Rp 28.77.251

Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	Rp 45.000.000	12 paket	Rp 48.150.000	12 paket	Rp 51.520.500	12 paket	Rp 55.126.935	12 paket Rp 58.985.820
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan											
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 dokumen	1000 dokumen	Rp 9.000.000	1000 dokumen	Rp 9.630.000	1000 dokumen	Rp 10.304.100	1000 dokumen	Rp 11.025.387	1000 dokumen Rp 11.797.164
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD											
Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 laporan	700 laporan	Rp 800.000.000	700 laporan	Rp 856.000.000	700 laporan	Rp 915.920.000	700 laporan	Rp 980.034.400	700 laporan Rp 1.048.636.808
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah											
Bertambahnya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan BMD	46 unit	50 unit	Rp 1.670.000.000	19 unit	Rp 540.000.000	26 unit	Rp 300.000.000	26 unit	Rp 205.000.000	26 unit Rp 255.000.000
Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan											
Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	7 unit	Rp 1.400.000.000	7 unit	Rp 250.000.000					
Sub Kegiatan pengadaan mebel											

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	30 unit	Rp 50.000.000	2 unit	Rp 80.000.000	13 unit	Rp 100.000.000	13 unit	Rp 105.000.000	13 unit	Rp 105.000.000
Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya												
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13 unit	Rp 220.000.000	10 unit	Rp 210.000.000	13 unit	Rp 200.000.000	13 unit	Rp 100.000.000	13 unit	Rp 150.000.000
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah												
Terselenggaranya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	Rp 187.000.000	100%	Rp 200.090.000	100%	Rp 214.096.300	100%	Rp 229.083.041	100%	Rp 245.118.854
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat												
Tertaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.000.000	12 Laporan	Rp 2.140.000	12 Laporan	Rp 2.289.800	12 Laporan	Rp 2.450.086	12 Laporan	Rp 2.621.592
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik												
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 95.000.000	12 Laporan	Rp 101.650.000	12 Laporan	Rp 108.765.500	12 Laporan	Rp 116.379.085	12 Laporan	Rp 124.525.621
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor												
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 90.000.000	12 Laporan	Rp 96.300.000	12 Laporan	Rp 103.041.000	12 Laporan	Rp 110.253.870	12 Laporan	Rp 117.971.641

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah												
Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah total BMD yang dipelihara	55 unit	55 unit	Rp 425.000.000	55 unit	Rp 540.750.000	55 unit	Rp 578.602.500	55 unit	Rp 619.104.675	55 unit	Rp 662.442.002
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	Rp 200.000.000	13 unit	Rp 214.000.000	13 unit	Rp 228.980.000	13 unit	Rp 245.008.600	13 unit	Rp 262.159.202
Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya												
Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	40 unit	Rp 25.000.000	40 unit	Rp 26.750.000	40 unit	Rp 28.622.500	40 unit	Rp 30.626.075	40 unit	Rp 32.769.900
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya												
Tersedianya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	Rp 200.000.000	3 unit	Rp 300.000.000	3 unit	Rp 321.000.000	3 unit	Rp 343.470.000	3 unit	Rp 367.512.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Rata-rata Indeks Desa Percentase Desa Mandiri	67,58	70,20	Rp 6.532.800.000	72,88	Rp 9.077.580.000	75,10	Rp 6.468.485.000	77,33	Rp 6.939.368.650	79,50	Rp 9.951.209.726
		5,26 %	7,02 %		8,77 %		10,53 %		12,28 %		14,04 %	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	34,21 %	36,84 %		38,60 %		40,35 %		42,11 %		43,86 %	
Program Penataan Desa												
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase fasilitas penataan Desa	0%	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 310.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa												
Meningkatnya Penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	0%	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 310.000.000	100%	Rp 310.000.000
Sub Kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa												
Tertaksananya Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa	2 Desa	Rp 250.000.000	2 Desa	Rp 250.000.000	2 Desa	Rp 250.000.000	2 Desa	Rp 250.000.000	2 Desa	Rp 250.000.000
Sub kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa												
Tertfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi				1 unit	Rp 60.000.000	1 unit	Rp 60.000.000	1 unit	Rp 60.000.000	1 unit	Rp 60.000.000
Program Peningkatan Kerja sama Desa												
Meningkatnya Efektivitas Kerja sama Desa	Persentase fasilitas desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	100%	100%	Rp 170.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000
Kegiatan Fasilitas kerjasama antar Desa												

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatnya Fasilitas kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	100%	100%	Rp 170.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan												
Terlaksananya Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		1 doku men	Rp 170.000.000	1 doku men	Rp 150.000.000	1 doku men	Rp 150.000.000	1 doku men	Rp 150.000.000		
Program Administrasi Pemerintahan Desa												
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	33%	50%	Rp 3.562.800.000	53%	Rp 5.889.080.000	58%	Rp 3.088.990.000	61%	Rp 3.355.509.000	64%	Rp 6.148.679.900
	Persentase desa yang menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase BUMdesa dan Bumdesa bersama yang telah mencapai peningkatan dengan status berkembang	31%	45%	52%	54%	55%	56%					
	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa											

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang dibina	100%	100%	Rp 3.562.800.000	100%	Rp 5.889.080.000	100%	Rp 3.088.990.000	100%	Rp 3.355.509.000	100%	Rp 6.148.679.900
Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa												
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Doku men			1 doku men	Rp 80.000.000	1 doku men	Rp 88.000.000	1 doku men	Rp 96.800.000	1 doku men	Rp 106.480.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa											
Terlaksananya Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	342 Doku men	342 doku men	Rp 161.000.000	342 doku men	Rp 177.100.000	342 doku men	Rp 194.810.000	342 doku men	Rp 214.291.000	342 doku men	Rp 35.720.100
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa											
Terlaksananya Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	114 doku men	129 doku men	Rp 203.800.000	170 doku men	Rp 224.180.000	114 doku men	Rp 203.800.000	114 doku men	Rp 203.800.000	157 doku men	Rp 203.800.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa											
Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	114 doku men	114 doku men	Rp 220.000.000	114 doku men	Rp 242.000.000	114 doku men	Rp 220.000.000	114 doku men	Rp 220.000.000	114 doku men	Rp 220.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa											
Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa	323 orang	114 orang	Rp 280.000.000	114 orang	Rp 308.000.000	114 orang	Rp 338.800.000	114 orang	Rp 372.680.000	114 orang	Rp 409.948.000

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas																			
Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa																			
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah Laporan Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa				1 laporan	Rp	100.000.000	1 laporan	Rp	110.000.000	1 laporan	Rp	121.000.000	1 laporan	Rp	133.100.000			
Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa																			
Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	1 dokumen	Rp	251.000.000	1 dokumen	Rp	276.100.000	1 dokumen	Rp	303.710.000	1 dokumen	Rp	334.081.000	1 dokumen	Rp	367.489.100		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa																			
Terselenggarakannya Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	114 laporan	15 laporan	Rp	1.100.000.000	56 laporan	Rp	3.000.000.000							43 laporan	Rp	2.500.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa																			
Terlaksananya Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp	250.000.000	1 dokumen	Rp	275.000.000	1 dokumen	Rp	302.500.000	1 dokumen	Rp	332.750.000	1 dokumen	Rp	366.025.000		
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa																			

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Terlaksananya Fasilitas pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1	1	Rp	180.000.000	1	Rp	198.000.000	1	Rp	217.800.000	1	Rp	239.580.000	1	Rp	263.538.000
		Dokumen	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen		
Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD																	
Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114	114	Rp	250.000.000	114	Rp	275.000.000	114	Rp	302.500.000	114	Rp	332.750.000	114	Rp	366.025.000
		Orang	orang			orang			orang			orang			orang		
Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penguasaan batas desa																	
Terlaksananya Fasilitas penetapan dan penguasaan batas desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penguasaan Batas Desa	9	10	Rp	200.000.000	5	Rp	220.000.000	5	Rp	242.000.000	5	Rp	266.200.000	5	Rp	292.820.000
		Desa	desa			desa			desa			desa			desa		
Sub Kegiatan Fasilitas pembinaan laporan kepala desa																	
Terlaksananya Fasilitas pembinaan laporan kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	114	114	Rp	167.000.000	114	Rp	183.700.000	114	Rp	202.070.000	114	Rp	222.277.000	114	Rp	244.504.700
		laporan	laporan			laporan			laporan			laporan			laporan		
Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan																	
Terlaksananya Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	2	Rp	300.000.000	2	Rp	330.000.000	2	Rp	363.000.000	2	Rp	399.300.000	2	Rp	439.230.000
		dokumen	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat																	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	Rp 2.550.000.000	100%	Rp 2.728.500.000	100%	Rp 2.919.495.000	100%	Rp 3.123.859.650	100%	Rp 3.342.529.826
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota												
Meningkatnya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100%	Rp 2.550.000.000	100%	Rp 2.728.500.000	100%	Rp 2.919.495.000	100%	Rp 3.123.859.650	100%	Rp 3.342.529.826
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat												
Tertaksananya Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	289 lembaga	289 lembaga	Rp 670.000.000	289 lembaga	Rp 716.900.000	289 lembaga	Rp 767.083.000	289 lembaga	Rp 820.778.810	289 lembaga	Rp 878.233.327
Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa												

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Terlaksananya Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 dokumen	1 dokumen	Rp 300.000.000	1 dokumen	Rp 321.000.000	1 dokumen	Rp 343.470.000	1 dokumen	Rp 367.512.900	1 dokumen	Rp 393.238.803
	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna											
Terlaksananya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Rp 180.000.000	1 Laporan	Rp 192.600.000	1 Laporan	Rp 206.082.000	1 Laporan	Rp 220.507.740	1 Laporan	Rp 235.943.282
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga											
Terlaksananya Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	Rp 1.400.000.000	1 dokumen	Rp 1.498.000.000	1 dokumen	Rp 1.602.860.000	1 dokumen	Rp 1.715.060.200	1 dokumen	Rp 1.835.114.414

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
			Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	
			Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	
			Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat dalam pembangunan		
			Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	

Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Desa (Rata-rata)	Nilai	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50	
2	Persentase Desa Mandiri	Desa	5,26%	7,02%	8,77%	10,53%	12,28%	14,04%	
3	Persentase Desa Maju	Desa	34,21%	36,84%	38,60%	40,35%	42,11%	43,86%	

Tabel Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	Sejak Tahun 2019 sudah tidak ada Desa Tertinggal
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	3,03	3,13	3,23	3,33	3,45	3,57	

Tabel Indikator Kinerja sesuai Permendagri 86 tahun 2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	16,67	17,54	18,42	19,30	20,18	22,30	
2.	Cakupan sarana prasana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	4967	4967	4967	4967	4967	4967	
4.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

V. PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi patokan dalam membuat Rencana Kerja setiap tahunan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini tidak bersifat kaku, untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik pengelolaan sumber pendanaan maupun waktu percepatan realisasinya.

Rencana Strategis ini perlu komitmen semua aparatur dalam pelaksanaannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengedepankan aspek perencanaan dokumen, pengendalian dan evaluasi secara tepat guna sehingga terwujud masyarakat dan desa yang mandiri.

Kuala Tungkal, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19840624 201101 1 005